

Strategi Pengelolaan Mutu Pendidikan di Sekolah dan Perguruan Tinggi: Kajian Kepustakaan tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

¹Supiati Warni, ²Heny Afrianti, ³Zulkarnain, ⁴Endang Supiyatun, ⁵Irya Isnawati ⁶Basilius Redan Werang

¹Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: alfiancilik@gmail.com

Received: July 2026; Revised: July 2026; Published: August 2026

Abstrak

Pengelolaan mutu pendidikan pada sekolah dan perguruan tinggi membutuhkan sistem penjaminan mutu yang mampu menghubungkan standar pendidikan dengan praktik pengelolaan dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu masih menghadapi persoalan berupa kecenderungan administratif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pemanfaatan data, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan yang menempatkan penjaminan mutu sebagai bagian integral dari tata kelola lembaga pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan mutu pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi melalui kajian kepustakaan terhadap implementasi sistem penjaminan mutu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan tematik melalui proses identifikasi, kategorisasi, perbandingan, dan sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan mutu yang efektif bertumpu pada kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, keterlibatan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, budaya mutu, evaluasi berkelanjutan, serta tindak lanjut yang konsisten. Pada sekolah, strategi tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan, sedangkan pada perguruan tinggi mencakup pengelolaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan layanan kelembagaan. Meskipun memiliki karakteristik organisasi yang berbeda, kedua jenjang pendidikan membutuhkan penjaminan mutu yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Dengan demikian, penguatan sistem penjaminan mutu perlu diarahkan dari orientasi pemenuhan administratif menuju pengelolaan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan nyata serta peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata kunci: pengelolaan mutu pendidikan; sistem penjaminan mutu; pengendalian mutu; sekolah; perguruan tinggi; kajian kepustakaan.

Educational Quality Management Strategies in Schools and Higher Education Institutions: A Literature Review of Quality Assurance System Implementation

Abstract

Educational quality management in schools and higher education institutions requires a quality assurance system capable of linking educational standards with management practices and continuous quality improvement. In practice, quality assurance systems continue to face challenges, including an excessive administrative orientation, limited human resource capacity, inadequate use of data, and suboptimal follow-up to evaluation results. These conditions highlight the importance of management strategies that position quality assurance as an integral component of educational institutional governance. This article aims to analyze educational quality management strategies in schools and higher education institutions through a literature review of quality assurance system implementation. The study employs a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from relevant scholarly literature and policy documents and were analyzed using content analysis with a thematic approach through the processes of identification, categorization, comparison, and synthesis. The findings indicate that effective quality management is grounded in strong leadership, data-informed decision-making, stakeholder engagement, human resource capacity development, a quality-oriented culture, continuous evaluation, and consistent follow-up. In schools, these strategies are primarily directed toward improving the quality of teaching and learning and educational services, whereas in higher education institutions, they encompass the management of education, research, community service, institutional governance, and academic and administrative services. Although schools and higher education institutions differ in their organizational characteristics, both require quality assurance systems that are integrated into planning, implementation, evaluation, control, and quality improvement processes. Therefore, strengthening quality assurance systems should move beyond an administrative compliance orientation toward a data-informed, participatory, and improvement-oriented approach that promotes meaningful and sustainable enhancement of educational quality.

Keywords: educational quality management; quality assurance system; quality control; schools; higher education institutions; literature review.

How to Cite: Warni, S., Afrianti, H. ., Zulkarnain, Z., Supiyatun, E. ., Isnawati, I. ., & Werang, B. R. . (2026). Strategi Pengelolaan Mutu Pendidikan di Sekolah dan Perguruan Tinggi: Kajian Kepustakaan tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 6004-6019. <https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6474>



<https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/article/view/6474>

Copyright© 2026, Warni et al.

This is an open-access article under the CC-BY-

SA License.



PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam memberikan layanan yang memenuhi standar dan menjawab kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan terhadap mutu tidak lagi terbatas pada pencapaian hasil belajar, tetapi juga mencakup kualitas proses pembelajaran, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan lembaga dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan (Cahyaningrum & Diana, 2023). Oleh karena itu, penguatan mutu membutuhkan pengelolaan yang terencana dan konsisten agar berbagai komponen pendidikan tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam suatu sistem yang mampu mengarahkan lembaga menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangan kebijakan pendidikan nasional, penguatan penjaminan mutu juga terus ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya membangun layanan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan (Kholillurrohman & Aisyatutsaniyah, 2025a).

Sistem penjaminan mutu menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan pendidikan tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi berkembang menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penjaminan mutu pada dasarnya mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Dengan mekanisme tersebut, lembaga pendidikan memiliki kerangka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi aktual, menentukan prioritas perbaikan, serta memastikan bahwa hasil evaluasi diterjemahkan ke dalam tindakan (Amalia et al., 2025). Pada pendidikan tinggi, misalnya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) didefinisikan sebagai kegiatan sistemik yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu seharusnya menjadi bagian dari proses pengelolaan institusi, bukan sekadar mekanisme administratif untuk memenuhi tuntutan akreditasi (Saputra et al., 2023).

Pada tingkat sekolah, implementasi penjaminan mutu berkaitan dengan kemampuan satuan pendidikan dalam menggunakan standar dan data sebagai dasar untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan mutu membutuhkan keterlibatan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi terhadap kondisi sekolah, identifikasi masalah, perencanaan perbaikan, pelaksanaan program, pemantauan, serta tindak lanjut perlu berlangsung sebagai suatu siklus yang saling berhubungan (Afiralda et al., 2025). Penguatan budaya mutu juga menjadi penting karena kualitas pendidikan tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan dokumen atau tim khusus penjaminan mutu. Kebijakan pendidikan nasional bahkan menekankan pentingnya budaya mutu yang melekat pada seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan serta pemanfaatan data sebagai dasar penguatan sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan (Unsil AL Huda & Badrul Mudarris, 2025).

Pada perguruan tinggi, kompleksitas pengelolaan mutu menjadi lebih luas karena mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, disertai berbagai aspek tata kelola, sumber daya manusia, layanan akademik,

kemahasiswaan, dan pengembangan kelembagaan. Sistem penjaminan mutu perlu mampu mengintegrasikan berbagai komponen tersebut dalam standar dan mekanisme evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi SPMI juga menuntut adanya komitmen pimpinan, pembagian tanggung jawab yang jelas, keterlibatan unit akademik dan administratif, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan. Dengan demikian, keberadaan sistem penjaminan mutu tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kemampuan sistem tersebut menghasilkan perubahan dalam praktik pengelolaan dan peningkatan kualitas institusi (Adeng Hudaya et al., 2025).

Meskipun sekolah dan perguruan tinggi memiliki karakteristik organisasi yang berbeda, implementasi sistem penjaminan mutu pada keduanya menghadapi persoalan yang memiliki keterkaitan. Ketersediaan standar belum selalu menjamin konsistensi pelaksanaan, sementara evaluasi yang dilakukan belum tentu menghasilkan tindak lanjut yang efektif. Persoalan lain berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, koordinasi antarunit, pemanfaatan data, partisipasi pemangku kepentingan, dan pembentukan budaya mutu. Apabila penjaminan mutu lebih banyak dipahami sebagai pemenuhan dokumen, laporan, atau kebutuhan akreditasi, maka fungsi perbaikan berkelanjutan berisiko menjadi kurang optimal. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya bagaimana membangun sistem penjaminan mutu, tetapi bagaimana mengelola dan mengimplementasikannya agar menghasilkan perbaikan nyata (Rahmawati et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, strategi pengelolaan mutu menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Strategi diperlukan untuk menghubungkan standar dengan praktik, data dengan pengambilan keputusan, evaluasi dengan tindakan perbaikan, serta kebijakan dengan perubahan pada tingkat operasional. Kepemimpinan yang kuat, keterlibatan seluruh warga lembaga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data, evaluasi berkelanjutan, komunikasi organisasi, dan tindak lanjut merupakan bagian yang dapat menentukan keberhasilan implementasi penjaminan mutu. Dengan kata lain, efektivitas sistem penjaminan mutu tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam kegiatan sehari-hari (Fattah Nasution et al., 2024a).

Berbagai kajian mengenai penjaminan mutu pendidikan telah membahas aspek standar, evaluasi, akreditasi, kepemimpinan, budaya mutu, dan pengembangan kelembagaan. Namun, literatur tersebut masih perlu dibaca secara lebih terintegrasi untuk memahami strategi pengelolaan yang memungkinkan sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai mekanisme peningkatan mutu, khususnya ketika ditempatkan dalam dua konteks kelembagaan yang berbeda, yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Kajian yang memadukan kedua konteks tersebut penting karena terdapat prinsip-prinsip pengelolaan mutu yang dapat diterapkan secara umum, tetapi juga terdapat perbedaan dalam struktur organisasi, ruang lingkup layanan, karakteristik pemangku kepentingan, serta mekanisme pengendalian mutu. Oleh karena itu, kajian kepustakaan diperlukan untuk mengidentifikasi pola-pola strategi yang dapat menjelaskan bagaimana sistem penjaminan mutu dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan pada kedua jenjang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan mutu pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi melalui kajian kepustakaan terhadap implementasi sistem penjaminan mutu. Kajian difokuskan pada empat aspek utama, yaitu (1) strategi implementasi sistem penjaminan mutu, (2) mekanisme pengelolaan dan pengendalian mutu, (3) faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta (4) kontribusi sistem penjaminan mutu terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan mutu sekaligus merumuskan prinsip-prinsip strategis yang dapat digunakan sekolah dan perguruan tinggi dalam membangun sistem penjaminan mutu yang tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi berorientasi pada perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis strategi pengelolaan mutu pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi dalam implementasi sistem penjaminan mutu (Malik et al., 2025). Kajian kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris, tetapi untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep, hasil penelitian, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan mutu dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan regulasi yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai sumber akademik dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain *pengelolaan mutu pendidikan*, *penjaminan mutu pendidikan*, *sistem penjaminan mutu*, *pengendalian mutu pendidikan*, *quality management in education*, *quality assurance in schools*, *quality assurance in higher education*, dan *continuous quality improvement*.

Literatur dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan penelitian, kredibilitas sumber, kesesuaian dengan konteks sekolah atau perguruan tinggi, serta kandungan informasi mengenai strategi, mekanisme, faktor pendukung dan penghambat, maupun hasil implementasi sistem penjaminan mutu. Kriteria pemilihan literatur digunakan untuk memastikan bahwa sumber yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Literatur

Aspek	Kriteria
Fokus kajian	Pengelolaan mutu, sistem penjaminan mutu, pengendalian mutu, evaluasi mutu, budaya mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan
Konteks	Sekolah/satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi
Substansi	Strategi implementasi, mekanisme penjaminan mutu, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusi terhadap peningkatan mutu
Jenis sumber	Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan

Kredibilitas	Diutamakan berasal dari jurnal ilmiah, penerbit akademik, lembaga pemerintah, dan institusi resmi
Kemutakhiran	Mengutamakan literatur mutakhir dengan tetap menggunakan sumber klasik yang memiliki relevansi konseptual
Bahasa	Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
Kesesuaian	Memiliki informasi yang memadai untuk dianalisis dan disintesis sesuai tujuan penelitian

Literatur yang telah dipilih selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan strategi, mekanisme, dan praktik penjaminan mutu pendidikan. Informasi dari setiap sumber dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antarsumber. Artikel penelitian dan karya akademik digunakan untuk mengidentifikasi perspektif konseptual serta gambaran implementasi penjaminan mutu dalam berbagai konteks pendidikan, sedangkan dokumen kebijakan dan regulasi digunakan untuk memahami perkembangan kerangka penjaminan mutu pada masing-masing jenjang pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi digunakan sebagai salah satu sumber untuk mengidentifikasi perkembangan kebijakan dan mekanisme penjaminan mutu. Literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah digunakan untuk memperkaya informasi mengenai praktik pengelolaan mutu pada satuan pendidikan. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dan disintesis untuk mengidentifikasi pola strategi, mekanisme pengelolaan, faktor yang memengaruhi implementasi, serta kontribusi sistem penjaminan mutu terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan melalui beberapa proses yang saling berkesinambungan, yaitu membaca dan memahami isi literatur, mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan informasi ke dalam tema, membandingkan informasi antarsumber, dan menyusun sintesis berdasarkan pola yang ditemukan (Noly et al., 2022). Fokus analisis ditetapkan pada empat aspek utama, yaitu strategi implementasi sistem penjaminan mutu, mekanisme pengelolaan dan pengendalian mutu, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta kontribusi sistem penjaminan mutu terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai kerangka untuk mengorganisasikan hasil kajian agar pembahasan tidak berhenti pada deskripsi masing-masing literatur, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih terintegrasi. Fokus analisis tersebut dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Fokus Analisis Kajian Kepustakaan

Fokus Analisis	Aspek yang Dikaji
Strategi implementasi	Perencanaan mutu, kepemimpinan, keterlibatan warga lembaga, pengembangan kapasitas, dan integrasi mutu dalam tata kelola

Pengelolaan dan pengendalian mutu	Penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, tindak lanjut, dan peningkatan mutu
Faktor pendukung dan penghambat	Kepemimpinan, sumber daya manusia, budaya mutu, data, sarana prasarana, koordinasi, dan komitmen kelembagaan
Kontribusi terhadap mutu	Peningkatan kualitas pembelajaran, layanan pendidikan, tata kelola, kinerja kelembagaan, dan perbaikan berkelanjutan

Analisis selanjutnya dilakukan secara komparatif dengan membandingkan literatur yang membahas sekolah dan perguruan tinggi. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi prinsip pengelolaan mutu yang memiliki kesamaan pada kedua konteks sekaligus menemukan karakteristik strategi yang berbeda sesuai dengan struktur, fungsi, dan kompleksitas masing-masing lembaga. Dengan pendekatan tersebut, hasil kajian tidak diarahkan untuk menentukan lembaga mana yang memiliki sistem penjaminan mutu yang lebih baik, tetapi untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan mutu dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasi pendidikan.

Keabsahan hasil kajian dijaga melalui triangulasi sumber kepustakaan, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis dan perspektif sumber untuk memastikan konsistensi informasi serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Proses analisis kemudian diakhiri dengan sintesis konseptual yang menghubungkan strategi pengelolaan, mekanisme penjaminan dan pengendalian mutu, faktor implementasi, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan (Umbase, 2023). Dengan demikian, metode kajian kepustakaan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pengelolaan sistem penjaminan mutu di sekolah dan perguruan tinggi sekaligus mengidentifikasi prinsip-prinsip strategis yang dapat mendukung perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa pengelolaan mutu pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem penjaminan mutu yang terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata kelola lembaga. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak cukup dipahami sebagai seperangkat prosedur untuk memastikan ketercapaian standar, tetapi perlu ditempatkan sebagai mekanisme organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas perbaikan, mengendalikan pelaksanaan program, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Meskipun sekolah dan perguruan tinggi memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda, terdapat pola yang relatif konsisten dalam implementasi penjaminan mutu, yaitu pentingnya kepemimpinan, keterlibatan warga lembaga, penggunaan data, evaluasi berkala, tindak lanjut, dan pembentukan budaya mutu. Sintesis hasil kajian berdasarkan fokus penelitian disajikan pada Tabel 3 dan gambar 1.

Tabel 3. Sintesis Hasil Kajian Kepustakaan tentang Pengelolaan Mutu Pendidikan

Fokus	Sekolah	Perguruan Tinggi	Sintesis
Strategi implementasi	Kepemimpinan kepala sekolah, perencanaan berbasis data, keterlibatan guru, evaluasi program	Kepemimpinan institusi, integrasi mutu dalam tata kelola, keterlibatan unit akademik, pengembangan standar	Kepemimpinan dan integrasi mutu dalam perencanaan merupakan faktor strategis
Pengelolaan dan pengendalian	Penetapan target, pelaksanaan program, evaluasi diri, tindak lanjut	Penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, peningkatan	Penjaminan mutu efektif ketika membentuk siklus perbaikan yang berkelanjutan
Faktor pendukung	Komitmen kepala sekolah, kompetensi guru, budaya mutu, data dan kolaborasi	Komitmen pimpinan, kapasitas SDM, sistem data, koordinasi unit, budaya mutu	Komitmen dan kapasitas organisasi menjadi fondasi implementasi
Faktor penghambat	Administrasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi, tindak lanjut yang lemah	Birokrasi, fragmentasi unit, keterbatasan SDM, orientasi akreditasi	Formalisme dan orientasi administratif dapat melemahkan fungsi perbaikan
Kontribusi	Perbaikan pembelajaran, layanan, kinerja sekolah	Peningkatan tata kelola, pembelajaran, penelitian, layanan dan kinerja institusi	Penjaminan mutu berkontribusi ketika hasil evaluasi diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan



Gambar 1. Sintesis hasil kajian berdasarkan fokus penelitian

Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Hasil kajian memperlihatkan bahwa strategi pertama yang menentukan keberhasilan penjaminan mutu adalah integrasi mutu ke dalam proses pengelolaan lembaga. Sistem penjaminan mutu akan lebih efektif apabila tidak diposisikan sebagai kegiatan tambahan yang hanya dilakukan pada saat evaluasi atau akreditasi, tetapi menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sekolah, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan data hasil belajar, evaluasi program, kondisi sumber daya, dan kebutuhan peserta didik sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu. Pada perguruan tinggi, integrasi dilakukan melalui penyelarasan standar mutu dengan perencanaan institusi, program studi, kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan administrasi.

Kepemimpinan menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Penjaminan mutu membutuhkan pimpinan yang tidak hanya memastikan tersedianya dokumen dan prosedur, tetapi juga mampu membangun komitmen bersama terhadap peningkatan kualitas. Pada sekolah, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mengarahkan guru dan tenaga kependidikan untuk menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan pembelajaran (Rusito et al., 2025). Pada perguruan tinggi, pimpinan institusi dan unit akademik berperan dalam memastikan bahwa sistem mutu diterapkan secara konsisten pada berbagai unit dan tidak berhenti pada tingkat kebijakan. Dengan demikian, kepemimpinan mutu lebih tepat dipahami sebagai

kemampuan untuk menggerakkan organisasi agar menjadikan peningkatan kualitas sebagai bagian dari praktik kelembagaan sehari-hari (Fajrin Afandi et al., 2025).

Strategi berikutnya adalah penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengelolaan mutu yang tidak didukung data berisiko menghasilkan program yang didasarkan pada asumsi. Data memungkinkan lembaga mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan kondisi aktual, menentukan masalah yang paling membutuhkan perhatian, serta memantau perubahan setelah intervensi dilakukan (Fajrin Afandi et al., 2025). Pada sekolah, data dapat berasal dari hasil asesmen, kehadiran, evaluasi pembelajaran, supervisi akademik, dan berbagai informasi lain yang tersedia pada satuan pendidikan. Pada perguruan tinggi, data dapat mencakup kinerja akademik mahasiswa, evaluasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tracer study, layanan mahasiswa, serta indikator kinerja institusi. Penggunaan data dengan demikian menjadi penghubung antara proses evaluasi dan pengambilan keputusan (Herwanti et al., 2022).

Pengelolaan dan Pengendalian Mutu sebagai Siklus Perbaikan

Literatur menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu akan memiliki makna yang lebih kuat apabila dilaksanakan sebagai siklus perbaikan berkelanjutan. Penetapan standar merupakan tahap awal, tetapi keberhasilan sistem ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam memastikan standar tersebut dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Oleh sebab itu, pengelolaan mutu tidak berhenti pada pertanyaan apakah standar telah terpenuhi, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai apa yang perlu diperbaiki setelah hasil evaluasi diperoleh.

Dalam konteks sekolah, siklus tersebut dapat terlihat melalui proses identifikasi kebutuhan, penetapan target, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Misalnya, ketika hasil evaluasi menunjukkan rendahnya capaian pada aspek tertentu, sekolah perlu menganalisis penyebabnya sebelum menentukan intervensi. Hasil intervensi kemudian dievaluasi kembali untuk mengetahui efektivitasnya (Jannana et al., 2025). Pola tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak seharusnya menjadi tahap akhir, melainkan menjadi dasar bagi perencanaan berikutnya.

Pada perguruan tinggi, mekanisme serupa diterapkan dalam lingkup yang lebih kompleks. Penjaminan mutu perlu menghubungkan standar institusi dengan pelaksanaan kegiatan pada tingkat fakultas, program studi, maupun unit pendukung. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum, proses pembelajaran, layanan mahasiswa, kinerja dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun tata kelola kelembagaan (Nuraeni et al., 2025). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pengendalian mutu membutuhkan koordinasi lintas unit agar hasil evaluasi pada satu bagian dapat diterjemahkan menjadi perbaikan pada bagian lain yang terkait.

Hal penting yang muncul dari sintesis literatur adalah bahwa evaluasi tanpa tindak lanjut tidak cukup untuk menghasilkan peningkatan mutu. Banyak sistem penjaminan mutu memiliki mekanisme evaluasi yang relatif jelas, tetapi manfaatnya menjadi terbatas ketika hasil evaluasi hanya berhenti pada laporan. Karena itu, kualitas sistem tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut diikuti dengan tindakan korektif dan peningkatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi sistem penjaminan mutu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lembaga. Salah satu faktor pendukung yang paling konsisten dalam literatur adalah komitmen pimpinan dan keterlibatan warga lembaga. Penjaminan mutu membutuhkan perubahan dalam cara organisasi bekerja sehingga tidak dapat hanya dibebankan kepada satu unit atau kelompok tertentu (Nuraeni et al., 2025). Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit pendukung perlu memahami peran masing-masing dalam proses peningkatan mutu. Faktor pendukung berikutnya adalah kapasitas sumber daya manusia. Sistem mutu yang baik membutuhkan individu yang mampu memahami standar, mengelola data, melakukan evaluasi, menganalisis masalah, dan menyusun tindak lanjut. Keterbatasan kompetensi dalam aspek tersebut dapat menyebabkan sistem penjaminan mutu lebih banyak berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada pemecahan masalah (Fattah Nasution et al., 2024b). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan mutu.

Budaya mutu juga menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan sistem. Budaya mutu terbentuk ketika evaluasi dan perbaikan menjadi kebiasaan organisasi, bukan hanya respons terhadap tuntutan eksternal. Dalam budaya seperti ini, kesenjangan terhadap standar tidak semata-mata dipandang sebagai kesalahan, tetapi sebagai informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem. Pendekatan tersebut penting karena peningkatan mutu membutuhkan keterbukaan terhadap evaluasi dan kesediaan organisasi untuk melakukan perubahan (Kholillurrohman & Aisyatutsaniyah, 2025b).

Di sisi lain, kajian menunjukkan adanya sejumlah hambatan. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah formalisme dalam implementasi penjaminan mutu. Ketika sistem lebih banyak diarahkan pada penyusunan dokumen, pelaporan, dan pemenuhan kebutuhan akreditasi, perhatian terhadap substansi perbaikan dapat berkurang. Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, ketidakteraturan pengelolaan data, serta lemahnya tindak lanjut hasil evaluasi. Pada perguruan tinggi, kompleksitas struktur organisasi dapat menimbulkan tantangan tambahan berupa fragmentasi antarunit. Sistem penjaminan mutu dapat berjalan pada tingkat program studi, fakultas, dan institusi

dengan mekanisme yang berbeda apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, pada sekolah, keterbatasan jumlah tenaga dan beban administratif dapat menyebabkan kegiatan penjaminan mutu sulit dilakukan secara optimal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa strategi penjaminan mutu perlu mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik organisasi masing-masing (Yoga Budi Bhakti et al., 2022).

Kontribusi Sistem Penjaminan Mutu terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan apabila mekanismenya mampu menghasilkan perubahan nyata pada proses pengelolaan dan layanan pendidikan. Pada sekolah, kontribusi tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, perbaikan pengelolaan program, penggunaan data dalam perencanaan, serta peningkatan kualitas layanan kepada peserta didik. Sistem penjaminan mutu membantu sekolah memiliki kerangka yang lebih terstruktur dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan tindakan perbaikan (Sy, 2022).

Pada perguruan tinggi, kontribusi penjaminan mutu memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup kualitas pembelajaran, kurikulum, kompetensi dosen, layanan mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan pengembangan kelembagaan. Sistem penjaminan mutu memungkinkan perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar secara lebih terstruktur dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar peningkatan kinerja institusi (Permadi & Lamo, 2025).

Namun demikian, kontribusi tersebut tidak bersifat otomatis. Sistem penjaminan mutu hanya akan memberikan dampak apabila hasil evaluasi diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan perbaikan. Dengan demikian, keberhasilan penjaminan mutu lebih tepat dilihat dari perubahan yang terjadi setelah suatu siklus mutu dilaksanakan daripada sekadar kelengkapan perangkat administrasinya. Perspektif ini menggeser orientasi penjaminan mutu dari *compliance-oriented quality assurance* menuju *improvement-oriented quality assurance*.

Sintesis Strategi Pengelolaan Mutu di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Berdasarkan keseluruhan kajian, terdapat keterkaitan yang kuat antara kepemimpinan, data, budaya mutu, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut dalam menentukan efektivitas sistem penjaminan mutu. Komponen-komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu rangkaian yang saling memperkuat. Kepemimpinan memberikan arah dan komitmen, data menyediakan dasar pengambilan keputusan, budaya mutu mendorong keterlibatan, evaluasi menghasilkan informasi mengenai capaian dan kesenjangan, sedangkan tindak lanjut

mengubah hasil evaluasi menjadi perbaikan. Hubungan antarkomponen tersebut dapat dirumuskan dalam suatu pola pengelolaan mutu sebagai berikut:

Kepemimpinan dan komitmen → identifikasi masalah berbasis data → penetapan standar dan prioritas → implementasi program → evaluasi → pengendalian → tindak lanjut → peningkatan mutu → evaluasi kembali.

Pola tersebut menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu pada dasarnya merupakan siklus pembelajaran organisasi. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menggunakan sistem mutu untuk mengetahui apakah standar telah tercapai, tetapi juga menggunakan informasi dari proses evaluasi untuk belajar mengenai kelemahan organisasi dan menentukan cara memperbaikinya. Dengan demikian, semakin kuat hubungan antara evaluasi, pengambilan keputusan, dan tindak lanjut, semakin besar peluang sistem penjaminan mutu menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Perbedaan konteks antara sekolah dan perguruan tinggi tetap perlu diperhatikan. Sekolah lebih berorientasi pada pengelolaan pembelajaran dan layanan peserta didik dengan struktur organisasi yang relatif lebih sederhana, sedangkan perguruan tinggi memiliki cakupan mutu yang lebih luas dan melibatkan banyak unit dengan fungsi yang berbeda. Meskipun demikian, prinsip dasarnya relatif sama, yaitu mutu harus dikelola secara sistematis, berbasis data, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dievaluasi secara berkala, dan selalu diikuti dengan tindakan perbaikan.

Dengan demikian, kajian ini memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan mutu yang efektif bukan terutama ditentukan oleh banyaknya instrumen atau dokumen yang dimiliki lembaga, melainkan oleh kemampuan lembaga mengintegrasikan sistem penjaminan mutu ke dalam praktik tata kelola sehari-hari. Penjaminan mutu yang terintegrasi memungkinkan standar, data, evaluasi, dan pengambilan keputusan bekerja dalam satu siklus yang menghasilkan pembelajaran organisasi dan peningkatan kualitas. Perspektif tersebut penting bagi sekolah maupun perguruan tinggi karena menempatkan sistem penjaminan mutu bukan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk membangun kapasitas lembaga dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus.

KESIMPULAN

Pengelolaan mutu pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi membutuhkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan keseluruhan proses tata kelola lembaga, sehingga penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan standar dan tuntutan administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas perbaikan, mengevaluasi pelaksanaan program, mengendalikan ketidaksesuaian, dan mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Pada sekolah, pengelolaan mutu terutama berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, pemanfaatan data, penguatan kualitas pembelajaran,

keterlibatan guru dan tenaga kependidikan, serta tindak lanjut hasil evaluasi, sedangkan pada perguruan tinggi cakupannya meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, dan layanan kelembagaan. Efektivitas sistem penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, budaya mutu, pemanfaatan data, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut, sementara orientasi yang terlalu administratif, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, serta tidak konsistennya tindak lanjut dapat mengurangi fungsi penjaminan mutu sebagai mekanisme perbaikan. Meskipun sekolah dan perguruan tinggi memiliki struktur, fungsi, dan tingkat kompleksitas yang berbeda, keduanya membutuhkan prinsip pengelolaan mutu yang serupa, yaitu kepemimpinan yang kuat, pengambilan keputusan berbasis data, keterlibatan seluruh warga lembaga, evaluasi berkelanjutan, pengendalian yang konsisten, dan tindak lanjut yang terarah. Keterpaduan unsur-unsur tersebut membentuk siklus perbaikan yang memungkinkan lembaga mengenali kesenjangan, merespons permasalahan, mengevaluasi perubahan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan, sehingga penguatan sistem penjaminan mutu perlu diarahkan dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan administratif menuju pengelolaan mutu yang berorientasi pada pembelajaran organisasi, perbaikan nyata, dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Penguatan sistem penjaminan mutu di sekolah dan perguruan tinggi perlu diarahkan pada pengelolaan yang lebih substantif, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pimpinan lembaga perlu memastikan bahwa sistem penjaminan mutu terintegrasi dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, didukung oleh pemanfaatan data yang akurat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif seluruh warga lembaga dan pemangku kepentingan. Evaluasi mutu juga perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dipantau secara berkala agar hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan atau pemenuhan dokumen. Sekolah dan perguruan tinggi perlu membangun budaya mutu yang menempatkan evaluasi sebagai proses pembelajaran organisasi dan mendorong setiap unit untuk melakukan perbaikan berdasarkan kebutuhan nyata. Selain itu, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data perlu diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Bagi pengelola dan pembuat kebijakan, diperlukan kebijakan penjaminan mutu yang memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk mengembangkan strategi sesuai dengan karakteristik dan kapasitasnya, dengan tetap menjaga ketercapaian standar yang ditetapkan. Kajian selanjutnya juga perlu memperluas penelitian empiris untuk menguji efektivitas berbagai strategi penjaminan mutu dalam konteks sekolah dan perguruan tinggi yang berbeda, sehingga pengembangan sistem mutu tidak hanya bertumpu pada kerangka

konseptual, tetapi juga didukung oleh bukti mengenai praktik yang paling efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

ACKNOWLEDGMENT

-

REFERENSI

- Adeng Hudaya, Idha isnaningrum, Iramdan, & Suhendra. (2025). SPMI Sebagai Pilar Pengembangan Mutu Berkelanjutan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4(2), 178–189. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i2.968>
- Afiralda, I., Bakri, M., Dewi, M. S., & Radzuanuddin, S. N. B. A. (2025). Internal Quality Assurance System in Indonesian Basic Education: A Systematic Literature Review. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 8(2), 282. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v8i2.32857>
- Amalia, K., Zawawi, A. A., & Museyibzada, R. (2025). TQM-Based Curriculum Sanctioning and Transdisciplinary Collaboration as a Strategy for Attaining International Accreditation: A Case Study of the Educational Management Department at UNESA. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 6(6), 2190–2200. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v6i6.1175>
- Cahyaningrum, D. E., & Diana, D. (2023). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 2895–2906. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4453>
- Fajrin Afandi, Natasya Salsa Sabila, Nadia Khumairoh, & Mu'alimin Mu'alimin. (2025). Strategi Penguatan Budaya Mutu di Satuan Pendidikan: Sintesis Temuan Utama dari Literature Review 2020–2025. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 200–206. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i5.1497>
- Fattah Nasution, A., Nur'aini, I., Elvina, E., & Hanafi, M. H. (2024a). Pendekatan Sistem Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(3), 1886–1894. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.601>
- Fattah Nasution, A., Nur'aini, I., Elvina, E., & Hanafi, M. H. (2024b). Pendekatan Sistem Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(3), 1886–1894. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.601>
- Herwanti, K., Nugrohadi, S., . M., Baatarkhuu, K., Christo Petra Nugraha, S., & Novita, M. (2022). Importance of Data-based Planning in Kurikulum Merdeka Implementation. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i19.12448>
- Jannana, N. S., Sugiyono, S., & Wijayanti, W. (2025). Cyclical and Value-Based Quality Assurance: A Case Study of a Religious Program at an Islamic Senior High School

- in Indonesia. *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 157–174. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v4i2.102>
- Kholillurrohman, K., & Aisyatutsaniyah, N. (2025a). Implementasi dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar: Kajian Studi Pustaka. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 10(1), 1397. <https://doi.org/10.18860/icied.v10i1.3793>
- Kholillurrohman, K., & Aisyatutsaniyah, N. (2025b). Implementasi dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar: Kajian Studi Pustaka. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 10(1), 1397. <https://doi.org/10.18860/icied.v10i1.3793>
- Malik, A., Milati, E. C., & Faridah, I. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 102–112. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i2.635>
- Noly, N. H., Usman, U., Tulus, T. J., & Iswan, I. E. (2022). Sistem Penjamin Mutu Internal dan Eksternal pada Lembaga Pendidikan Dasar. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i2.595>
- Nuraeni, A., Astri Lindasari, Risma Rahmawati, Siti Nur Aida Amalia, & Abdul Kholik. (2025). Analisis Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3756–3772. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.18275>
- Permadi, I., & Lamo, Muh. L. (2025). Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 01–11. <https://doi.org/10.69679/jian.v4i2.8579>
- Rahmawati, I., Lestari, H., & Jamil, M. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *JOURNAL EDUCATIONAL MANAGEMENT REVIEWS AND RESEARCH*, 3(02), 14–21. <https://doi.org/10.56406/emrr.v3i02.643>
- Rusito, R., Sonjaya, T., Nugroho, A., & Permana, D. (2025). Adaptive Innovation Paradigm in Archipelagic Governance Analysis of Civil Servants' Perceptions in Pangkajene and Kepulauan Regency, Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(3), 949–965. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i3.67034>
- Saputra, Y. S., Yulisma, L., Arifin, N. R., Hanafiah, N., & Wahidin, D. (2023). MANAJEMEN EVALUASI DIRI DALAM PENINGKATAN KINERJA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(1), 105. <https://doi.org/10.25157/jwp.v10i1.9813>
- Sy, S. H. (2022). Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 697. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.841>

- Umbase, R. S. (2023). Management of quality assurance and development of the quality culture of higher education in Indonesia. *Multidisciplinary Reviews*, 6(4), 2023032. <https://doi.org/10.31893/multirev.2023032>
- Unsil AL Huda, & Badrul Mudarris. (2025). PERAN STAKEHOLDER DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS: MI. BAHARUL ULUM WATUPANJANG - KRUCIL). *Irfani*, 21(3), 1127-1142. <https://doi.org/10.30603/irfani.v21i3.7060>
- Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, & Riyadi. (2022). URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL & EKSTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 251-260. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1394>